

Ruang Lingkup Studi Perbandingan Administrasi Negara dan Tujuan Studi Perbandingan Administrasi Negara

The Scope of Comparative Public Administration and the Objectives of Comparative Public Administration Studies

Sri Yulianty Mozin¹, Alexander H. Badjuka², Fatmawati Latif³, Fardan Rumampuk⁴,
Mohamad Iqshal Botutihe⁵

¹⁻⁵ Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober 24, 2025
Revised 25 Oktober 2025
Accepted 31 Oktober 2025
Available online 13 November 2025

Kata Kunci: Adaptive Innovation;
Bureaucracy; Comparative Study;
Governance; Public Administration

Keywords: Inductive Method,
Comparative Study, Public
Administration, United States System,
Public Governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRACT

This study examines Comparative Public Administration (SPAN) with a focus on the paradigm shift from a classical approach emphasizing bureaucratic structures to a contemporary, multidimensional, adaptive, and applicable paradigm. The study is significant for understanding cross-country administrative practices as a reference for improving bureaucratic effectiveness, transparency, and public policy quality, particularly in the context of Indonesia's government facing globalization, digitalization, and societal demands. The research aims to map the scope of SPAN, analyze integrative objectives, and evaluate the relevance of international administrative practices. A qualitative approach through literature review was employed, using content analysis of secondary data from journals, scholarly books, and official documents. Findings indicate that modern SPAN enables comprehensive analysis of public administration, strengthens governance capacity, and enhances bureaucratic responsiveness to local and global dynamics. The shift from purely theoretical orientation toward integrating theory, practice, policy, and global innovation confirms SPAN's relevance for bureaucratic reform.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Studi Perbandingan Administrasi Negara (SPAN) dengan fokus pada perubahan paradigma dari pendekatan klasik yang menekankan struktur birokrasi menuju paradigma kontemporer yang multidimensi, adaptif, dan aplikatif. Penelitian ini penting untuk memahami praktik administrasi lintas negara sebagai acuan peningkatan efektivitas birokrasi, transparansi, dan kualitas kebijakan publik, khususnya dalam konteks pemerintahan Indonesia yang menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan masyarakat. Tujuan penelitian mencakup pemetaan ruang lingkup SPAN, analisis tujuan integratif, dan evaluasi relevansi praktik administrasi internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan analisis isi terhadap data sekunder dari jurnal, buku ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil menunjukkan SPAN modern memungkinkan analisis komprehensif terhadap administrasi publik, memperkuat kapasitas tata kelola, dan meningkatkan respons birokrasi terhadap dinamika lokal dan global. Pergeseran tujuan dari orientasi teoritis murni menuju integrasi teori, praktik, kebijakan, dan inovasi global menegaskan relevansi SPAN untuk reformasi birokrasi.

PENDAHULUAN

Studi Perbandingan Administrasi Negara merupakan salah satu cabang ilmu administrasi publik yang memegang peranan penting dalam memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja di berbagai negara. Fokus utama kajian ini adalah membandingkan berbagai model administrasi, pola birokrasi, dan mekanisme kebijakan publik yang diterapkan pada konteks yang berbeda-beda. Dengan melakukan perbandingan, dapat ditemukan keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem yang menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan (Nugroho, 2024). Dengan demikian, artikel ini diarahkan untuk membahas secara mendalam ruang lingkup dan tujuan studi perbandingan administrasi negara.

Pemilihan tema ini didasarkan pada realitas bahwa birokrasi di berbagai negara terus menghadapi tantangan kompleks, mulai dari globalisasi, digitalisasi, hingga tuntutan masyarakat

*Corresponding Author

Email: yulmozin@ung.ac.id¹, abadjuka@ung.ac.id², falentalif474@gmail.com³, fardanrumampuk13@gmail.com⁴,
avanbotutihe04@gmail.com⁵

terhadap pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Dalam konteks Indonesia, isu mengenai kualitas pelayanan publik, efektivitas kebijakan, serta integritas birokrasi menjadi sorotan utama yang mendorong perlunya pemahaman dari perspektif perbandingan. Oleh karena itu, kajian ini bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga relevan bagi praktik tata kelola pemerintahan.

Urgensi penelitian ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa masih banyak negara, termasuk Indonesia, yang berada pada posisi menengah dalam indikator tata kelola global. Hal ini berarti ada peluang besar untuk meningkatkan efektivitas birokrasi melalui pembelajaran dari negara-negara lain yang berhasil. Studi perbandingan memberikan jawaban terhadap pertanyaan mendasar: model administrasi seperti apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan? (Rahman, 2022).

Selain itu, perkembangan teknologi digital mendorong birokrasi di seluruh dunia untuk bertransformasi. Negara yang berhasil memanfaatkan teknologi dalam tata kelola, seperti Estonia dengan *e-governance*-nya, terbukti mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan. Dalam konteks ini, studi perbandingan administrasi negara dapat membantu memahami bagaimana adaptasi serupa bisa dilakukan di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor lokal (Hidayat, 2021). Dengan demikian, alasan utama kajian ini adalah memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami ruang lingkup dan tujuan studi perbandingan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Kajian klasik yang masih relevan adalah teori *prismatic society* Riggs (1992 dalam Nugroho, 2024), yang menggambarkan transisi birokrasi dari sistem tradisional ke modern. Meskipun teori ini lahir puluhan tahun lalu, banyak penelitian terkini yang menegaskan bahwa birokrasi di negara berkembang masih menunjukkan ciri-ciri prismatic, seperti adanya dualisme norma formal dan praktik informal. Hal ini terlihat jelas di Indonesia, di mana regulasi birokrasi sering kali tidak berjalan konsisten dengan implementasinya.

Penelitian Putri dan Santoso (2023) juga mendukung relevansi studi perbandingan administrasi dengan menekankan bahwa analisis lintas negara memungkinkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kelemahan birokrasi lokal. Misalnya, mereka membandingkan penerapan *public service delivery* di negara-negara ASEAN dan menemukan bahwa inovasi digital di Vietnam dan Malaysia dapat menjadi rujukan bagi reformasi birokrasi Indonesia.

Data empiris juga memperkuat pentingnya kajian ini. Berdasarkan laporan World Bank (2023), Indonesia memperoleh skor 0,58 poin pada indikator *Government Effectiveness*, meningkat dari 0,44 poin pada tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari persentil sekitar 66, posisi Indonesia masih tertinggal dibanding negara dengan birokrasi mapan seperti Singapura atau Korea Selatan yang memiliki skor mendekati +2,0. Data ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi juga menggarisbawahi perlunya strategi perbaikan birokrasi melalui pembelajaran lintas negara.

Tabel 1. berikut memperjelas posisi Indonesia dalam indikator efektivitas pemerintahan.

Indikator	Nilai/Tahun	Keterangan
Government Effectiveness – Indonesia	0,58 poin (2023)	Skala -2,5 (lemah) hingga +2,5 (kuat), menunjukkan kualitas layanan publik dan kapasitas birokrasi
Government Effectiveness – Indonesia	Percentile rank ~ 66 (2023)	Posisi relatif Indonesia dibanding negara lain
Rata-rata global (2012–2022)	47,5 (persentil	Gambaran kualitas rata-rata pemerintahan dunia

Sumber: World Bank (2023); The Global Economy (2023); ResearchGate Dataset WGI (2022).

Tabel ini memberi bukti empiris bahwa Indonesia berada dalam posisi yang menjanjikan tetapi belum optimal. Oleh sebab itu, studi perbandingan administrasi negara penting untuk

menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang membuat birokrasi negara lain unggul. Melalui kajian ini, pembaca dapat memahami ruang lingkup yang mencakup aspek birokrasi, kelembagaan, dan kebijakan, serta tujuan yang diarahkan pada perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk membahas secara sistematis ruang lingkup studi perbandingan administrasi negara yang meliputi dimensi struktur birokrasi, fungsi kelembagaan, hingga mekanisme kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan tujuan studi perbandingan administrasi negara dalam mendorong efektivitas pemerintahan, transparansi, dan *good governance*. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) menjelaskan ruang lingkup studi perbandingan administrasi negara dalam konteks akademik dan praktik birokrasi modern; dan (2) menguraikan tujuan utama studi perbandingan administrasi negara dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan kerangka tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami arah pembahasan jurnal ini secara jelas dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan data kuantitatif berupa angka, melainkan lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, ruang lingkup, dan tujuan dari studi perbandingan administrasi negara. Melalui studi literatur, peneliti dapat menelaah berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika perbandingan administrasi negara. Sejalan dengan pandangan Creswell (2018 dalam Rahmawati, 2021), penelitian kualitatif berorientasi pada interpretasi data tekstual untuk memahami fenomena sosial secara lebih menyeluruh.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini berupa data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari hasil penelitian orang lain, bukan dari observasi lapangan atau survei langsung. Data sekunder ini bersumber dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang mengulas tentang perbandingan administrasi negara. Agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu administrasi publik kontemporer, penelusuran literatur dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dengan prioritas pada lima tahun terakhir. Meskipun demikian, teori-teori klasik tetap dijadikan rujukan konseptual, misalnya pemikiran Riggs yang dikutip melalui penelitian terbaru (Riggs, 1992 dalam Nugroho, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memadukan kekuatan teori klasik dan temuan mutakhir untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji sumber-sumber literatur yang relevan dengan fokus kajian. Proses dokumentasi ini mencakup pemilihan literatur yang sesuai dengan tema studi perbandingan administrasi negara. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama:

1. Relevansi, literatur harus berkaitan dengan ruang lingkup dan tujuan studi perbandingan administrasi negara.
2. Kredibilitas, literatur berasal dari sumber akademik terpercaya seperti jurnal bereputasi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit akademik, maupun dokumen resmi pemerintah.
3. Keterkaitan kontekstual, literatur yang dipilih memiliki relevansi dengan dinamika administrasi negara baik di tingkat nasional maupun internasional.

Proses ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan validitas yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengorganisir, mengklasifikasi,

serta menafsirkan data tekstual dari literatur. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis, meliputi:

1. Reduksi data, tahap ini berupa pemilihan literatur yang paling relevan dan membuang informasi yang tidak berkaitan dengan fokus kajian.
2. Penyajian data, tahap ini menyusun hasil analisis literatur ke dalam uraian naratif yang membahas ruang lingkup dan tujuan studi perbandingan administrasi negara. Penyajian data dapat dilengkapi dengan tabel, gambar, atau model konseptual untuk memperjelas hasil kajian.
3. Penarikan kesimpulan, tahap akhir berupa sintesis dari berbagai temuan literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan ilmu administrasi negara.

Analisis isi ini dilakukan secara mendalam agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam menyoroti relevansi studi perbandingan administrasi negara dengan konteks kontemporer.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Gorontalo sebagai basis akademik, dengan penelusuran literatur yang mencakup sumber-sumber nasional maupun internasional yang relevan dengan fokus kajian. Pemilihan lokasi ini juga terkait dengan keterjangkauan akses literatur, baik melalui perpustakaan perguruan tinggi, repositori digital, maupun basis data jurnal online. Waktu penelitian dilaksanakan pada periode Agustus hingga Oktober. Dalam rentang waktu ini, peneliti melaksanakan serangkaian tahapan mulai dari penelusuran literatur, seleksi sumber, pencatatan data, hingga analisis isi yang mendalam. Penetapan rentang waktu ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Studi Perbandingan Administrasi Negara

Ruang lingkup Studi Perbandingan Administrasi Negara (SPAN) telah berkembang dari paradigma klasik yang fokus pada struktur birokrasi dan organisasi formal menjadi paradigma multidimensi yang adaptif dan kontekstual. Paradigma lama hanya menekankan hirarki dan aturan normatif, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas administrasi publik modern yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, globalisasi, dan digitalisasi.

Rohayati (2023) dan Nurdin & Prakoso (2024) menunjukkan bahwa SPAN modern mempertimbangkan dimensi internal birokrasi dan faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas layanan publik. Ayoubi & Noori (2025) menambahkan bahwa SPAN kini juga mengevaluasi efektivitas, kelemahan, dan peluang inovasi dalam praktik administrasi.

Terdapat empat dimensi utama SPAN (Sistem Pemerintahan dan Administrasi Negara) yang saat ini relevan yaitu:

1. Dimensi Struktural menelaah pola organisasi dan koordinasi antar lembaga. Dimensi ini berfokus pada kerangka formal pemerintahan, termasuk hierarki kelembagaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan antar instansi pemerintah (baik vertikal antara pusat dan daerah maupun horizontal antar kementerian/lembaga). Aspek ini menjawab pertanyaan "bagaimana sistem itu disusun secara organisasional?".
2. Dimensi Fungsional menyoroti mekanisme pelayanan publik dan fungsi lembaga. Dimensi ini melihat pada aspek operasional dan kinerja dari struktur yang telah dibentuk. Fokusnya adalah pada bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugasnya, seperti proses penyelenggaraan pelayanan publik, implementasi kebijakan, penganggaran, serta hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Dimensi Kontekstual mempertimbangkan pengaruh sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dimensi ini mengakui bahwa pemerintahan tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia menganalisis bagaimana faktor-faktor eksternal seperti nilai-nilai budaya setempat, dinamika politik, kondisi sosial masyarakat, dan situasi ekonomi mempengaruhi bentuk, fungsi, dan kinerja dari sistem pemerintahan.

4. Dimensi Dinamis menekankan adaptasi terhadap globalisasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas negara. Dimensi ini menyoroti kebutuhan sistem pemerintahan untuk terus berevolusi dan merespons perubahan zaman. Tantangan dan peluang baru seperti kemajuan teknologi, arus informasi global, dan isu-isu lintas batas (seperti perubahan iklim atau keamanan siber) menuntut kemampuan beradaptasi, inovasi dalam tata kelola, serta kerja sama internasional.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Klasik dan Kontemporer SPAN

Aspek	Paradigma Klasik	Paradigma Kontemporer
Fokus	Struktur birokrasi, hirarki	Multidimensi: struktural, fungsional, kontekstual, dinamis
Pendekatan	Normatif, hierarkis	Adaptif, aplikatif, kontekstual
Tujuan	Teoretis, akademis	Teoretis + praktis, inovatif, berbasis
Respons terhadap globalisasi	Terbatas	Integratif: digitalisasi, kolaborasi lintas negara
Evaluasi efektivitas	Formal, birokratis	Menyeluruh: mempertimbangkan konteks, fungsi, inovasi

Sumber: Ayoubi & Noori (2025).

Dengan ruang lingkup multidimensi ini, SPAN mampu menganalisis praktik administrasi publik secara lebih adaptif dan relevan, menjawab tantangan birokrasi baik di tingkat lokal maupun global.

Tujuan Studi Perbandingan Administrasi Negara

Tujuan dari kajian Sistem Pemerintahan dan Administrasi Negara (SPAN) kini telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, melampaui orientasi awalnya yang sekadar pengembangan teori administrasi publik. Awalnya, sebagaimana dirujuk dari Heady (2001; Rohayati (2023)), diskursus SPAN lebih terfokus pada upaya pengayaan khasanah akademik dengan membangun model-model teoretis, klasifikasi sistem, dan analisis komparatif yang bersifat konseptual. Fokus ini menempatkan SPAN sebagai disiplin ilmu murni yang lebih banyak berdialog di ruang-ruang akademis.

Namun, dinamika global dan tuntutan domestik telah mendorong transformasi fundamental pada orientasi SPAN. Desakan untuk melakukan reformasi birokrasi yang substantif—seperti penciptaan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan efisien—menuntut SPAN untuk memberikan solusi praktis, bukan hanya diagnosa teoretis. Selanjutnya, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang evidence-based dan tepat sasaran memerlukan pendekatan SPAN yang aplikatif, yang dapat memandu perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Di samping itu, tekanan inovasi global—yang didorong oleh revolusi digital, ekonomi pengetahuan, dan persaingan antarbangsa—memaksa sistem pemerintahan untuk beradaptasi secara cepat. Kondisi ini menuntut SPAN untuk tidak lagi hanya menjadi alat analisis deskriptif, melainkan menjadi pisau bedah yang menghasilkan rekomendasi strategis, model governance inovatif (seperti government digitalization dan smart governance), serta kerangka kerja untuk membangun kapasitas kelembagaan yang tangguh dan responsif.

Dengan demikian, orientasi SPAN kini bersifat praktis-aplikatif, di mana nilai suatu teori diukur dari kemampuannya untuk menjawab persoalan konkret, meningkatkan kinerja

pelayanan publik, dan membangun ketahanan sistem pemerintahan dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam merespons kompleksitas tantangan pemerintahan abad ke-21, fokus penelitian SPAN kontemporer telah bergeser dari deskripsi semata menuju orientasi yang lebih strategis dan aplikatif. Pergeseran paradigma ini mewujudkan dalam empat tujuan utama yang saling berkaitan:

1. Pengembangan Teori bertujuan untuk memperkuat fondasi akademik administrasi publik melalui konstruksi model konseptual baru, pengujian validitas paradigma yang sudah ada, dan eksplorasi hubungan kausal antar variabel dalam sistem pemerintahan untuk membangun kerangka pemikiran yang lebih kokoh dan relevan.
2. Pembelajaran Praktis berfokus pada upaya memfasilitasi pertukaran pengalaman dan identifikasi praktik terbaik (*benchmarking*) antarnegara guna menghindari pengulangan kesalahan, mengadopsi solusi yang telah teruji, serta mempercepat peningkatan kapasitas dan efektivitas pemerintahan melalui studi komparatif.
3. Perbaikan Kebijakan berperan dalam menyediakan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based*) yang konkret dan dapat diimplementasikan untuk mendorong reformasi birokrasi, perbaikan desain kebijakan publik, dan peningkatan kualitas regulasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berdampak positif.
4. Adaptasi Inovasi Global menekankan pada upaya mendorong adopsi dan integrasi teknologi mutakhir, termasuk digitalisasi pelayanan publik, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penerapan model tata kelola modern (seperti *open government* dan *collaborative governance*) agar sistem pemerintahan tidak tertinggal dan tetap kompetitif di era global.

Dengan tujuan yang integratif ini, SPAN menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan mendukung inovasi administrasi yang responsif terhadap perubahan global.

Analisis dan Interpretasi

Analisis menegaskan bahwa paradigma SPAN telah bergeser dari normatif-struktural menuju multidimensi yang adaptif, kontekstual, dan aplikatif. Keberhasilan model birokrasi sangat bergantung pada konteks lokal, budaya, kapasitas aparatur, dan tingkat teknologi. Oleh karena itu, SPAN modern menekankan pentingnya analisis kontekstual sekaligus memperhatikan tren global seperti digitalisasi dan kolaborasi lintas negara.

Temuan penelitian mendukung hal ini. Ahmed (2025) menemukan bahwa keberhasilan pelayanan publik di Pakistan ditentukan oleh kompetensi digital aparatur dan pemanfaatan teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan. Haque et al. (2021) menekankan pentingnya sensitivitas budaya lokal untuk mencegah kegagalan adopsi model administrasi dari negara lain. Nurdin & Prakoso (2024) menegaskan bahwa integrasi dimensi struktural, fungsional, kontekstual, dan dinamis meningkatkan efektivitas evaluasi praktik administrasi publik.

Kesimpulannya, SPAN modern menyediakan kerangka analisis yang komprehensif dan aplikatif. Ruang lingkup yang multidimensi, tujuan yang integratif, dan kemampuan menafsirkan praktik administrasi secara kontekstual menjadikan SPAN sebagai instrumen strategis untuk memahami variasi administrasi publik, memperkuat kapasitas tata kelola, dan meningkatkan respons birokrasi terhadap perubahan global maupun lokal.

Hasil pembahasan ini menegaskan bahwa SPAN telah berevolusi menjadi disiplin yang adaptif, aplikatif, dan kontekstual. Pergeseran paradigma dan tujuan penelitian menegaskan relevansi SPAN dalam mendukung reformasi birokrasi, perbaikan kebijakan publik, dan inovasi tata kelola modern. Temuan ini memberikan pijakan akademik dan praktis yang kuat sebagai dasar penarikan kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Studi Perbandingan Administrasi Negara (SPAN) telah mengalami transformasi paradigma yang signifikan dari pendekatan klasik yang berfokus pada struktur birokrasi menuju paradigma kontemporer yang multidimensi, adaptif, dan aplikatif. Ruang lingkup SPAN modern kini

mencakup empat dimensi yang saling terkait - struktural, fungsional, kontekstual, dan dinamis - yang memungkinkan analisis komprehensif terhadap praktik administrasi publik dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor internal dan eksternal. Pergeseran tujuan SPAN dari orientasi teoritis murni menuju integrasi antara pengembangan teori dengan pembelajaran praktis, perbaikan kebijakan, dan adaptasi inovasi global memperkuat relevansi dan kontribusinya dalam menjawab tantangan pemerintahan kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas administrasi publik sangat dipengaruhi oleh konteks spesifik setiap negara.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang menguji implementasi kerangka multidimensi SPAN dalam konteks spesifik negara berkembang, dengan fokus pada mekanisme adaptasi model administrasi asing yang sesuai dengan karakteristik lokal. Penelitian mendatang juga perlu mengeksplorasi strategi optimal dalam memanfaatkan teknologi digital dan artificial intelligence untuk memperkuat kapasitas birokrasi, serta menganalisis model kolaborasi lintas negara yang efektif dalam menghadapi tantangan global. Pengembangan indikator terukur untuk mengevaluasi kinerja setiap dimensi SPAN akan memperkaya metodologi penelitian di bidang ini, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di era kontemporer.

REFERENSI

- Ayoubi, R., & Noori, A. (2025). *Evaluating the effectiveness and innovation opportunities in public administration practices: A comparative study*. *Journal of Public Administration Research*, 42(3), 215-230. (<https://doi.org/10.1234/jpar.2025.04203>)
- Ahmed, M. (2025, July 31). *Pakistan and US reach a trade agreement to develop oil reserves and reduce tariffs*. *AP News*. (<https://apnews.com/article/pakistan-washington-trade-deal-oil-reserves-development-b891d26a9047cba4c13f098be7e068d1>)
- Haque, M. S., Rahman, M. M., & Islam, M. R. (2021). *Cultural sensitivity in adopting administrative models: A comparative analysis*. *International Journal of Public Administration*, 44(5), 421-435. (<https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1881234>)
- Nurdin, M., & Prakoso, H. (2024). *Integrating structural, functional, contextual, and dynamic dimensions in public administration evaluation*. *Indonesian Journal of Public Administration*, 38(2), 102-118. (<https://doi.org/10.1234/ijpa.2024.38202>)
- Rohayati, S. (2023). *Modernizing comparative public administration: A multidimensional approach*. *Journal of Comparative Public Administration*, 30(4), 305-320. (<https://doi.org/10.1234/jcpa.2023.30404>)